

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas upah pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa Kota Jambi berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yang memadukan data primer melalui wawancara langsung dengan para pekerja serta data sekunder dari studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara upah yang diterima oleh sebagian besar pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa dengan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Jambi tahun 2025 yang sebesar Rp3.607.223,00. Banyak pekerja hanya menerima upah berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp3.000.000,00 dan sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis ataupun jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum dari pihak pekerja, lemahnya pengawasan pemerintah, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, perusahaan, dan pekerja sendiri untuk mendorong implementasi perlindungan hukum yang adil dan manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan regulasi dan pengawasan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor swasta menengah.

**Kata Kunci:** Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Pekerja, PT Widyaloka Jaya Perkasa, Upah

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal protection of workers' rights to wages at PT Widyaloka Jaya Perkasa in Jambi City based on labor regulations, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is empirical juridical with a descriptive approach, combining primary data obtained through interviews with employees and secondary data derived from literature studies and relevant labor laws. The findings show a discrepancy between the wages received by most workers at PT Widyaloka Jaya Perkasa and the 2025 Jambi City Minimum Wage (UMK) of IDR 3,607,223.00. Many workers only receive wages ranging from IDR 1,500,000 to IDR 3,000,000 and most do not have written employment contracts or access to social security programs such as BPJS Ketenagakerjaan. This situation constitutes a violation of several legal provisions, including Law Number 13 of 2003 on Manpower and its derivative regulations, such as Government Regulation Number 36 of 2021 and Number 51 of 2023 on Wages. The main challenges identified include the lack of legal awareness among workers, weak supervision and enforcement by labor authorities, and insufficient legal compliance from the company. Therefore, concrete steps are needed from the government, companies, and workers to ensure the fair and humane implementation of legal protections in labor relations. This study is expected to serve as a foundation for strengthening regulatory frameworks, improving enforcement mechanisms, and enhancing workers' welfare, particularly in the private mid-scale business sector.*

**Keywords:** *Employment, Legal Protection, PT Widyaloka Jaya Perkasa, Workers, Wages*